

Pendampingan dalam Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kecamatan Lantari Jaya

M. Fauzhan Algiffari

fauzan.algiffari@gmail.com

Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Abstract: *Poverty is a challenge for the government that must be resolved in order to improve the economy in the region. The delay in the development of poor areas coupled with the global economic slowdown is very worrying, so instructions from the government are needed in improving infrastructure for basic settlement infrastructure that can create jobs for the community so that the community's economy increases. On December 10, 2019, the President of the Republic of Indonesia, at a meeting to direct the acceleration of the implementation of the infrastructure program, secured the Ministry of Public Works and Public Housing in increasing labor-intensive activities that intersect with empowering local communities so that they become a binding force for the economy. The Regional Economic Infrastructure Program (PISEW) in its journey is one of the government programs whose goal is to improve the community's economy using the self-management method which will be managed by community groups under the auspices of the Inter-Village Cooperation Agency (BKAD), so that the impact and benefits can be felt directly by the local community. This economic improvement is specifically for people who live in Lantari Jaya sub-district, Bombana district, Southeast Sulawesi province. In practice, community self-management is the direct manager, therefore assistance is needed and having competent assistants in determining and analyzing the infrastructure to be built, in order to improve the economy of the community.*

Keywords: *Assistance, PISEW, BKAD*

Pendahuluan

Pemerintah melaksanakan kebijakan terpadu dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri" Pada tahun 2007. Melalui beberapa program pemerintah yang dikelola oleh beberapa kementerian dan berorientasi pada

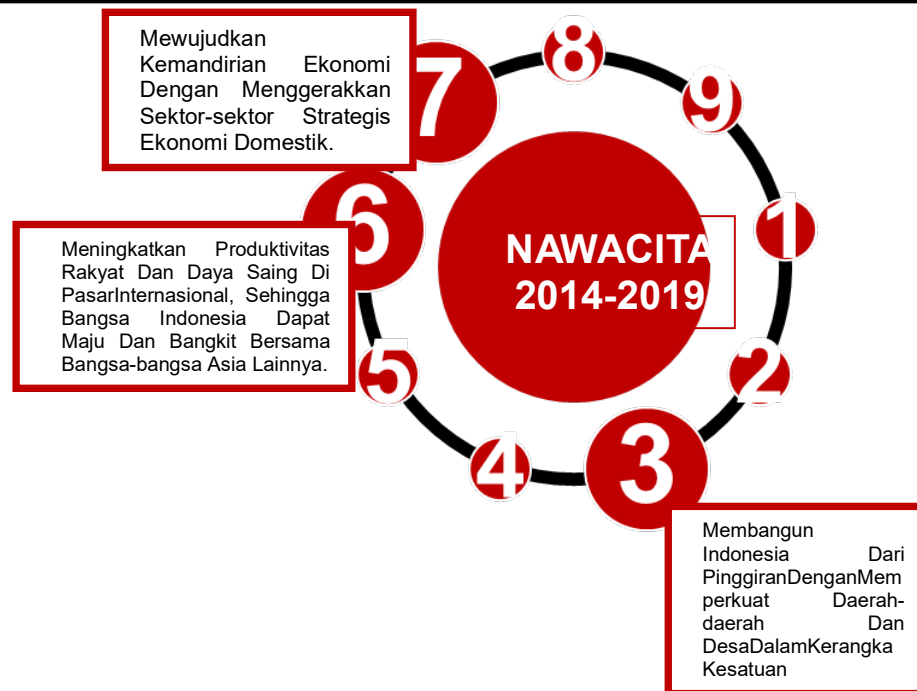
pemberdayaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur dengan pola padat karya yaitu program PNPM-Mandiri.

Pendanaan program PNPM-Mandiri dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang pelaksanaannya dikoordinasi langsung oleh Kemenko Kesra, dimana seluruh kecamatan di Indonesia mendapat dana yang dikelola langsung oleh masyarakat. Dalam kegiatan PNPM-Mandiri, Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan beberapa program, yaitu:

- 1) PNPM-Mandiri Perkotaan;
- 2) PNPM-Mandiri Rural Infrastructure Support (RIS);
- 3) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); serta
- 4) PNPM-Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM- PISEW), dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya bertindak sebagai lembaga pelaksana (executing agency) dibawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kementerian Dalam Negeri membantu pelaksanaan program terutama dalam bidang sosialisasi, diseminasi, publikasi, kampanye program, dan pelatihan (penguatan kelembagaan). Selain bekerja sama dengan dua lembaga tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum juga berkoordinasi dengan kementerian terkait (pertanian, kelautan dan perikanan, pendidikan, serta kesehatan).

Peningkatan dan pengembangan infrastruktur perlu dilakukan berdasarkan pengalaman dalam pembangunan kawasan perdesaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berpandangan perlu dilakukannya kegiatan swakelola yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan, serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan seluas 78.384 ha. Pengembangan ekonomi lokal memiliki posisi strategis dalam RPJMN tahun 2015-2019, sekaligus tertuang dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia.

Sasaran Nawacita pun tertuang dalam rencana pembangunan berbagai infrastruktur, seperti transportasi, sanitasi, kesehatan, peningkatan dan pemasaran hasil produksi.



Gambar 1. Program Nawacita 2014-2019

Infrastruktur yang dibangun dapat berupa jalan (1), jembatan (2), drainase irigasi (3), bangunan sederhana (4) dan sebagainya. Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) digunakan dalam rangka penyediaan atau peningkatan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan perdesaan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah perdesaan. Hasil-hasil kegiatan konstruksi nantinya akan diserahkan oleh Satker PKP provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Pemerintah Daerah/Desa untuk dilakukan pemanfaatan dan pemeliharaan secara swadaya dan berkelanjutan.(5)

Pendekatan

Dalam pelaksanaan Program PISEW ada empat pendekatan yang dilakukan, yaitu:

1. Partisipatif Birokratis

Pendekatan Partisipatif Birokratis dilaksanakan pada tahap persiapan dengan mengikut sertakan aparatur pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam melakukan identifikasi potensi kelembagaan di tingkat kecamatan untuk ditetapkan sebagai pengelola dalam pelaksanaan perencanaan dan konstruksi kegiatan PISEW, dan memfasilitasi kelembagaan yang terpilih untuk memiliki status legalitas kelembagaan melalui pencatatan di notaris dan terdaftar sebagai lembaga masyarakat disalah satu SKPD (Bapermas atau nama lain) di Pemerintah daerah Kabupaten.

2. Partisipatif Teknokratis

Pendekatan Partisipatif Teknokratis, dilaksanakan pada tahap perencanaan, dilaksanakan

bersama oleh Satker Provinsi melalui Fasilitator Masyarakat, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Tim Pelaksana Kabupaten dalam menyusun Profil Kawasan serta Prioritas Rencana pembangunan Infrastruktur Kawasan perdesaan lengkap dengan Perencanaan Teknis (gambar perencanaan dan RAB).

3. Teknokratis

Pendekatan Teknokratis dilaksanakan pada saat tahap pelaksanaan konstruksi walaupun pelaksana pembangunan konstruksi infrastruktur dilakukan oleh BKAD/lembaga sejenis lainnya namun tetap berdasarkan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam perencanaan teknis yang sesuai dengan jenis konstruksinya.

4. Birokratis

Pendekatan Birokratis dilaksanakan bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, monitoring dan Serah Terima Aset (Infrastruktur terbangun) yang selanjutnya dapat diserahterimakan pemeliharaan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa, dengan membentuk kelompok masyarakat untuk kebutuhan pemeliharaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan infrastruktur.

Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat dilaksanakan antara dosen Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo dengan BKAD Kecamatan Lantari Jaya. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2019. Strategi pelaksanaan pengabdian dilaksanakan secara bertahap yang dilakukan. Adapun strategi yang dilakukan untuk kegiatan Pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a) Pertemuan Kecamatan: Kegiatan dilakukan untuk menyampaikan dan menyebarluaskan tujuan dan arahan program kepada masyarakat Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana Prov. Sulawesi Tenggara.
- b) Survey Kawasan. Mencari dan mendapatkan apa saja potensi yang dimiliki dari Kawasan yang akan dibangun infrastruktur.
- c) Penyusunan dokumen perencanaan. Penyusunan dilakukan dan dijadikan acuan agar terarah sesuai yang direncanakan dalam pembuatan RAB dan DED.
- d) Rapat Prapelaksana. Menjelaskan rencana kerja dan syarat-syarat apa saja yang akan dibangun dan bagaimana untuk mencapai spek yang diharapkan. Dalam panduan teknis pelaksanaan kegiatan telah tertuang dalam pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman PUPR. (6)(7)(8)
- e) pemantauan dan pengawasan. Dilakukan infrastruktur yang dibangun sesuai dengan dengan perencanaan awal dan disepakati Bersama pada saat rapat prapelaksana.

Pembahasan

1. Lokasi Kawasan Dampungan

- o Lokasi Pusat Kawasan Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.
- o Lokasi Penyangga Kawasan 1 Desa Anugerah, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana.

a. Tujuan Kegiatan

Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana infrastruktur dengan melakukan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.

b. Sasaran Kegiatan

2. Profil Kecamatan Secara Umum

Kecamatan Lantari Jaya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bombana dengan Ibu Kota Desa Lantari dengan letak geografis antara 459.4'22" dan - 4 43.0'43" Lintang Selatan, antara 121 27.9'6" 122-" 42.24.0," Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Lantari Jaya sebesar 8.59 persen dari total luas daratan Kabupaten Bombana.

Luas wilayah Kecamatan Lantari Jaya sebesar 285.01 km² Terdiri atas wilayah daratan dan perairan. Wilayah yang memiliki luasterkecil adalah DesaAnugrah (6.74 Km) serta wilayah dengan luas terbesar yaitu Desa Tinabite (72.39 Km). Kecamatan Lantari Jaya terdapat 2 Desa berbatasan langsung dengan laut dan 7 Desa yang berada di wilayah daratan. (9)

3. Penetapan Kawasan PISEW terpilih (Peta dan Deliniasi)

Berdasarkan hasil identifikasi Kawasan serta memperhatikan maksud dan tujuan pelaksana Program PISEW, maka telah ditetapkan Kawasan sasaran PISEW tahun 2019 terdiri dari desa pusat kawasan dan desa penyangga kawasan. Desa-desa yang menjadi desa pusat kawasan dan penyangga kawasan yaitu:

- a. Desa Anugerah sebagai Pusat Kawasan.
- b. Desa Kalaero sebagai desa penyangga kawasan.

Desa Anugerah sebagai Pusat Kawasan

a. Letak Geografis

Desa Anugerah merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Lantari Jaya. Berdasarkan posisi geografisnya, Desa Anugerah memiliki batas - batas yaitu: (10)

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lantari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Rarowatu Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasare Apua

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalaero.

Desa Anugerah terdiri dari 4 (empat) Dusun yang mana dalam urusan pemerintahan Kepala Desa dibantu dengan masing-masing Kepala Dusunnya. Desa Anugerah mempunyai luas wilayah 750 Ha. Luas Lahan Pertanian + 600 Ha. Luas Permukiman + 50 Ha. Iklim Desa Anugerah sebagaimana desa-desa lain di Wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan iklim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan perkembangan yang menunjang kehidupan masyarakat yang ada di Desa Anugerah. Berdasarkan data statistik Desa Anugerah jumlah penduduk desa sebanyak 1.162 Jiwa. Dari 4 Dusun dengan demikian Desa Anugerah masih memiliki ruang yang cukup besar untuk mengembangkan potensinya.

b. Aksesibilitas Menuju Ibu Kota

Jarak Desa Anugerah dari ibu Kota Kecamatan Lantari Jaya yang sekaligus menjadi Ibu Kota Kabupaten Bombana 30 Km yang dapat ditempuh dengan jalan darat kendaraan darat roda dua dan roda empat.

c. Sektor Ekonomi Penduduk (Mata Pencaharian Utama)

Sebagian besar penduduk Desa Anugerah bermata pencaharian sebagai petani. Selebihnya bermata pencaharian dari sektor lain secara berturut-turut, sektor perdagangan dan sektor jasa, dan yang berstatus sebagai PNS dan pegawai swasta sebanyak 7 KK.

Desa Kalaero sebagai Kawasan Penyangga

a. Letak Geografis

Desa Kalaero merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Lantari Jaya. Berdasarkan posisi geografisnya, Desa Kalaero memiliki batas - batas yaitu: (11)

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lomba Kasih
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Rarowatu Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Anugerah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langkowala.

Desa Kalaero terdiri dari 3 (tiga) yang mana dalam urusan pemerintahan Kepala Desa dibantu dengan masing-masing Kepala Dusun. Desa Kalaero mempunyai luas wilayah 995.4350 Ha. Luas Lahan Pertanian 302 Ha. Luas Permukiman 57 Ha. Luas Ruang terbuka hijau 100 Ha. Iklim Desa Kalaero sebagaimana desa-desa lain di Wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan iklim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan perkembangan yang menunjang kehidupan masyarakat yang ada di Desa Kalaero.

b. Aksesibilitas Menuju Desa

Jarak Desa Kalaero dari ibu Kota Kecamatan Lantari Jaya yang sekaligus menjadi Ibu Kota Kabupaten Bombana + 26 Km yang dapat ditempuh dengan jalan darat kendaraan darat roda dua dan roda empat.

c. Data Kependudukan

Berdasarkan data statistik Kecamatan Lantari Jaya Dalam Angka jumlah penduduk Desa Kalaero sebanyak 873 jiwa, yang terdiri dari 354 pria dewasa, 351 perempuan dewasa, dan 78 anak-anak. Dari 3 Dusun yang ada terdapat 244 KK, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 57 KK.

d. Sektor Ekonomi Penduduk (Mata Pencaharian Utama)

Sebagian besar penduduk Desa Kalaero bermata pencaharian sebagai petani, yaitu sebanyak 229 KK. Selebihnya bermata pencaharian dari sektor lain secara berturut-turut, sector perdagangan 15 KK, dan yang berstatus sebagai PNS dan pegawai swasta sebanyak 13 KK.

PERTEMUAN KECAMATAN I

1. Sosialisasi dan pengenalan kegiatan PISEW kepada Masyarakat,
2. Penggalian potensi kawasan di kecamatan dan desa sasaran,
3. Penggalian rencana infrastruktur yang:
 - a) Sesuai dengan Indikator Kinerja Keberhasilan PISEW,
 - b) Didukung oleh potensi sumber daya yang ada di Kawasan tersebut,
 - c) Menjadi jalan keluar terhadap permasalahan/hambatan yang dihadapi masyarakat dalam hal sosial ekonomi wilayah/Kawasan
4. Mendapatkan BKAD yang disepakati masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.



Gambar 2. Pertemuan Kecamatan I

SURVEY KAWASAN SASARAN

1. Memetakan potensi dan permasalahan ekonomi serta infrastruktur
2. Mengetahui sinergitas kegiatan dan program desa, kecamatan dan kabupaten.
3. Mendapatkan gambaran tentang:
 - a) Kebutuhan infrastruktur
 - b) Permasalahan dan kendala dalam perencanaan
 - c) Kondisi lokasi kegiatan



Gambar 3. Survey Kawasan Sasaran

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

1. Pekerjaan Persiapan
 - a) Untuk mendapatkan data real lapangan
 - b) Agar lebih memahami permasalahan dan kendala dalam perencanaan di lokasi kegiatan.
2. Penyusunan Rancangan Teknis Rinci (Detailed Engineering Design/DED)
 - a) Agar pembangunan infrastruktur yang dilakukan bisa terukur, terkontrol serta bisa dipertanggungjawabkan secara teknis
 - b) Untuk mempermudah pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi
 - c) Kualitas dan kuantitas infrastruktur terjaga dengan baik
 - d) Sebagai dasar dalam perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)



Gambar 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan

RAPAT PRA PELAKSANAAN

1. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan konstruksi fisik di lapangan.
2. Sebagai forum diskusi pembahasan titik kritis dalam pelaksanaan.
3. Sebagai forum membahas strategi dan tata cara pelaksanaan konstruksi



Gambar 5. Rapat Pra Pelaksanaan

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI

Sebagai kontrol terhadap:

1. Kualitas dan kuantitas pekerjaan;
2. Efektifitas penggunaan alat, bahan, material serta tenaga kerja;
3. Penggunaan dana (akuntabilitas);
4. Waktu pelaksanaan.





Gambar 6. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi

Kesimpulan

Hasil yang didapatkan yakni 1) melalui program ini masyarakat dapat bersama-sama membangun desanya yang bertujuan untuk meningkat perekonomian setempat. Yang sebelumnya jalannya susah dilalui, maka diharapkan setelah adanya bantuan ini bisa mengifisienkan waktu dan tenaga; 2) pendampingan dalam kegiatan ini harus didampingi dengan pendamping yang menguasai konsep dan infrastruktur sosial ekonomi yang akan dibangun; 3) peran fasilitator dalam melakukan pendampingan mulai dari identifikasi Kelembagaan BKAD dan pencatatan ke Notaris, Memfasilitasi para kepala desa sasaran untuk membuat surat kesanggupan desa perihal program PISEW, Mendampingi dan memfasilitasi BKAD dalam persiapan sinkronisasi kegiatan PISEW dengan RKPD, Melakukan OJT kepada pengurus BKAD, Mendampingi BKAD dalam melaksanakan Survey Identifikasi Kawasan, Mendampingi BKAD dalam melaksanakan Survey Rencana Infrastruktur, Mendampingi BKAD dalam melaksanakan Penyusunan Dokumen Profil Kawasan dan Mendampingi BKAD dalam melaksanakan Penyusunan DED.

Daftar Pustaka

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2020). Buku Saku Petunjuk Konstruksi Jalan, hal. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2020). Buku Saku Petunjuk Konstruksi Jembatan, hal. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2020). BUKU SAKU PETUNJUK KONSTRUKSI INFRASTRUKTUR DRAINASE & IRIGASI, hal. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2020). Buku Saku Petunjuk Konstruksi Bangunan Sederhana, hal. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2019). Petunjuk Teknis Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat PISEW, hal. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2019). PETUNJUK PELAKSANAAN KONSTRUKSI PISEW, hal. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2019). PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, hal. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2020). PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PISEW, hal. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
- Mustopa, Z. (2020). Implementasi kebijakan program infrastruktur sosial ekonomi wilayah (pisew) di kabupaten subang. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 7 Nomor 2*. · <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/3350/pdf>
- BPS Lantari Jaya, Kecamatan Lantari Jaya Dalam Angka, BPS Kabupaten Bombana, 2018.

